

SURAT TUGAS
NOMOR: 17/KP.07/JI-22/07/2025

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kinerja tugas kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo, dipandang perlu untuk menyesuaikan tugas dan kewajiban pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan badan pengawas pemilihan umum sesuai dengan kebutuhan organisasi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Tahun 2025;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu memberikan surat tugas Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Probolinggo.

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3596.1.16/KP.01.01/SJ/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3597.1.341/KP.01.01/SJ/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4171.1.482/KP.01.01/SJ/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1037.1/KP.01.01/SJ/04/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1046.1/KP.01.01/SJ/04/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1062.1/KP.01.01/SJ/04/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2665.1/KP.01.01/SJ/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3929.01/KP.01.01/SJ/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3223.1/KP.01.01/SJ/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
17. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3996.1/KP.01.01/SJ/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4024.1/KP.01.01/SJ/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2811.1/KP.01.01/SJ/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6687/KP.01.01/SJ/06/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
21. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6739.1/KP.01.01/SJ/06/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
22. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6723.1/KP.01.01/SJ/06/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
23. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6686.1/KP.01.01/SJ/06/2025 tanggal 16 Juni 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
24. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 6921.1.68/KP.01.01/SJ/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
25. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA–115.01.2.686349/2025;
26. Berita Acara Rapat Pleno nomor : 3/RT.02/K.JI-22/7/2025 tanggal 02 Juli 2025.

MENUGASKAN :

Kepada : ***Daftar Terlampir***

Untuk : 1. Melaksanakan tugas kedinasan dan pekerjaan berdasarkan dengan profesional, disiplin, menjunjung nilai dasar dan etika pegawai, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab;

2. Memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya;

3. Dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Probolinggo, 30 Juli 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Probolinggo,



Maswijaya Siswa Rakhman, S.H.

Lampiran Surat Tugas
Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Probolinggo
Nomor : 17/KP.07/JI-22/07/2025
Tanggal : 30 Juli 2025

DAFTAR NAMA

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS UTAMA	TUGAS TAMBAHAN ATASAN LANGSUNG	STAF DIVISI
1	Muh. Purwanto, S.H.	Bendahara Pengelola Pembantu	Bendahara Pengelola Pembantu	-	-
2	Moh. Nurkafi, S.Ag.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data dan Informasi	Operator Keuangan	-
3	Milatun Nurin Nazema, S.M.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Subbagian Administrasi	Pengelola Keuangan	-
4	Adi Darma Setya Putra Irawan, S.Ak.	Ahli Pertama - Perencana	Subbagian Administrasi	Pengelola Barang Milik Negara	-
5	Najib Wahyudi, S.Kom.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data dan Informasi	Pembinaan dan Pengelolaan Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan	SDMO
6	Nurul Huda, S.T.	Ahli Pertama - Arsiparis	Subbagian Administrasi	-	SDMO
7	Iklimah Firdausiyah, S.E.	Ahli Pertama - Perencana	Subbagian Administrasi	Pelaksanaan Urusan Sumber Daya Manusia, Tata Laksana dan Organisasi	SDMO
8	Bella Aprelia Imanihar Dewi, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data dan Informasi	Tata Usaha Sumber Daya Manusia	SDMO
9	Amir Hamzah, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Subbagian Pengawasan Pemilu	-	PPH
10	Mohamad Adlin Perkasa Alam, S.Kom.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data dan Informasi	-	PPH
11	Ahmad Fauzy, S.M.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Subbagian Pengawasan Pemilu	Sopir	PPH

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS UTAMA	TUGAS TAMBAHAN ATASAN LANGSUNG	STAF DIVISI
12	Moh. Hamdan Azizi	Pengadministrasian Perkantoran	Subbagian Administrasi	Partisipasi Masyarakat, Protokol dan Keamanan Dalam, Pramusaji	PPH
13	Ferdinan Habibullah, S.H.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Subbagian Pengawasan Pemilu	-	PP Datin
14	Muhammad Subhi Adzimi, M.I.P.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Subbagian Pengawasan Pemilu	Hubungan Masyarakat	PP Datin
15	Anggita Ratih Iriyanti, S.Si.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data dan Informasi	-	PP Datin
16	Rio Ardin Armandha Putra, S.H.	Ahli Pertama - Analisis Hukum	Subbagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Hukum	HPS
17	Solihin, S.H.	Penata Layanan Operasional	Subbagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Protokol dan Keamanan Dalam, Pramusaji	HPS
18	Budi Susanto, A.Ma.Pd.S	Pengadministrasian Perkantoran	Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat Data dan Informasi	Penyelesaian Sengketa, Protokol dan Keamanan Dalam, Pramusaji	HPS

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Probolinggo,



Maswijaya Siswa Rakhman, S.H.